

## BAB 6 : KESIMPULAN

### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian Evaluasi Manajemen Program kesehatan Reproduksi Pada Saat Bencana Di Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

#### 1. Komponen Input

- a. Kebijakan dalam program kesehatan reproduksi pada saat bencana di Kabupaten Padang Pariaman belum ada, tetapi berpedoman pada Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan PPAM.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program kesehatan reproduksi pada saat bencana hanya satu orang yang sudah pernah mendapatkan pelatihan sebanyak 2 kali pada situasi tanggap darurat krisis kesehatan yaitu kepala seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi di Dinas Kesehatan.
- c. Dana dalam pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana berasal dari dana program secara umum yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan dana khusus untuk kesehatan reproduksi pada saat bencana belum tersedia.
- d. Sarana dan prasarana penunjang program kesehatan reproduksi pada saat bencana sebagian sudah tersedia dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman, dan BPBD Kabupaten Padang Pariaman.

#### 2. Komponen Proses

- a. Perencanaan untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana belum ada secara khusus.
- b. Belum ada dibentuk struktur organisasi khusus untuk kesehatan reproduksi pada saat bencana.

- c. Pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana yaitu pemberian pelayanan dan kebutuhan terhadap korban bencana.
- d. Pengawasan yang dilakukan pada saat bencana yaitu secara langsung setelah kejadian bencana.

### 3. Komponen Output

Cakupan indikator program kesehatan reproduksi pada saat bencana khusus untuk Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri belum mendapatkan pelayanan dan kebutuhan dengan baik.

### 6.2 Saran

Saran dari penelitian Evaluasi Manajemen Program kesehatan Reproduksi Pada Saat Bencana Di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman
  - a. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat membuat kebijakan khusus berupa peraturan daerah mengenai pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana
  - b. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk membentuk struktur organisasi serta tim khusus dalam program kesehatan reproduksi pada saat bencana agar mempermudah tenaga kesehatan mengetahui tugasnya masing-masing ketika turun ke lapangan.
2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman
  - a. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana, sehingga pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana bisa berjalan dengan baik dan lancar.

- b. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan pelatihan mengenai situasi tanggap darurat kesehatan kepada seluruh tenaga kesehatan dan tidak hanya untuk ketua atau kepala seksi saja yang mendapatkan pelatihan, tetapi juga kepada seluruh anggota dan staff kesehatan.
  - c. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman memilih seorang koordinator kesehatan reproduksi atau tim khusus untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana.
  - d. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman untuk mengalokasikan dana khusus untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana, agar tidak ada lagi kendala dalam melaksanakan program kesehatan reproduksi pada saat bencana.
  - e. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman untuk membuat usulan perencanaan yang khusus untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana, supaya ada kejelasan mengenai kegiatan-kegiatan atau program kesehatan reproduksi yang akan dilaksanakan jika suatu saat terjadi lagi bencana.
3. Bagi Puskesmas Anduring
- a. Diharapkan kepada Puskesmas Anduring untuk membuat kebijakan khusus atau Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana, sehingga pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana bisa berjalan dengan baik dan lancar.
  - b. Diharapkan kepada Puskesmas Anduring untuk membentuk struktur organisasi, memilih seorang koordinator kesehatan reproduksi atau tim

khusus untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana, memberikan pelatihan-pelatihan dan simulasi-simulasi tanggap darurat bencana kepada seluruh tim khusus kesehatan reproduksi.

- c. Diharapkan kepada Puskesmas Anduring untuk dapat melengkapi sarana dan prasarana kebutuhan kesehatan reproduksi berupa kit-kit kesehatan reproduksi yang sesuai dengan PPAM pada saat terjadi bencana.
- d. Diharapkan kepada Puskesmas Anduring untuk membuat usulan perencanaan yang khusus untuk program kesehatan reproduksi pada saat bencana, supaya ada kejelasan mengenai kegiatan-kegiatan atau program kesehatan reproduksi yang akan dilaksanakan jika suatu saat terjadi lagi bencana.
- e. Diharapkan kepada Puskesmas Anduring untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program kesehatan reproduksi pada saat bencana dengan berkoordinasi dengan lintas sektor supaya segala kebutuhan masyarakat terdampak bencana, khususnya kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi dapat terpenuhi.

#### 4. Bagi BPBD Kabupaten Padang Pariaman

- a. Diharapkan kepada BPBD Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan simulasi-simulasi tanggap darurat bencana, tidak hanya untuk beberapa orang saja tetapi kepada seluruh tim penanggulangan bencana, supaya seluruh tim penanggulangan bencana memiliki kemampuan dan keahlian dalam situasi tanggap darurat bencana.
- b. Diharapkan kepada BPBD Kabupaten Padang Pariaman untuk tetap menganggarkan dana darurat atau dana tidak terduga dalam usulan rencana kegiatan program penanggulangan bencana, sehingga jika terdapat kekurangan dana saat melaksanakan program, bisa menggunakan dana

tersebut dan kegiatan operasional pada saat bencana bisa berjalan dengan lancar.

5. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman

a. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan seluruh instansi yang terlibat dalam program penanggulangan bencana, untuk mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana sebelumnya, guna perbaikan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di masa mendatang.

b. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman untuk tetap menganggarkan dana darurat atau dana tidak terduga dalam usulan rencana kegiatan program penanggulangan bencana, sehingga jika terdapat kekurangan dana saat melaksanakan program, bisa menggunakan dana tersebut dan kegiatan operasional pada saat bencana bisa berjalan dengan lancar.

